



SUBYEK																																
KORAN/ MAJALAH	KOMPAS	POS KOTA	MAJALAH :															2013														
	SEPUTAR INDONESIA	RAKYAT MERDEKA	GATRA																													
	KORAN TEMPO	REPUBLIKA	TEMPO																													
	INVESTOR DAILY	MEDIA INDONESIA	INVESTOR INDONESIA																													
	✓ BISNIS INDONESIA	SUARA PEMBARUAN	WARTA EKONOMI																													
	KONTAN	NERACA																														
HALAMAN	A																															
TANGGAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
BULAN	JAN				PEB	MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGT			SEP			OKT			NOV		DES

► PROYEK JALAN

Pemilik Saham Tol Bali Berubah

JAKARTA—Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung menjadi pemilik saham baru di konsorsium PT Jasamarga Bali Tol, pemegang konsesi jalan tol Ngurah Rai-Tanjung Benoa-Nusa Dua.

Thomas Mola
redaksi@bisnis.com.id

Kedua pemerintah daerah ini memperoleh saham masing-masing 8,01% menyusul hengkangnya PT Wijaya Karya (Wika) Tbk dari konsorsium. Selain itu, komposisi kepemilikan saham pun berubah.

Direktur Utama Jasamarga Bali Tol Akhmad Tito Karim mengungkapkan rencana BUMN konstruksi, Wika melepas sahamnya sudah muncul sejak badan usaha itu dibentuk. Namun, rencana itu baru dapat terealisasi pada tahun ini. Dalam konsorsium itu Wika memiliki saham sebesar 5%.

"Keluarnya Wika justru mendatangkan dua investor lain yang masuk, yakni Pemprov Bali [8,01%] dan Kabupaten Badung [8,01%]. Hal itu sesuai dengan rapat umum pemegang saham pada 23 Januari lalu," paparnya, Senin (4/2).

Dia menjelaskan komposisi kepemilikan saham yang ber-

ubah antara lain PT Jasa Marga berkurang menjadi 55% dari sebelumnya 60%, PT Pelindo III menjadi 17,98% dari sebelumnya 20%, PT Angkasa Pura I menjadi 8% dari sebelumnya 10%.

Kemudian PT Utama Karya menjadi 1% dari sebelumnya sebesar 2%, PT Adhi Karya Tbk menjadi 1% dari sebelumnya 2%. Sementara PT Pengembangan Pariwisata Bali tetap 1%.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan pihaknya sudah menginformasikan perubahan komposisi saham itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk disetujui oleh Menteri PU Djoko Kirmanto.

Jika sudah mendapatkan persetujuan Menteri, akan dilakukan amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) lagi.

Walaupun terjadi perubahan kepemilikan saham, Tito memastikan jalan tol yang sedang dilakukan pengerjaan konstruks-

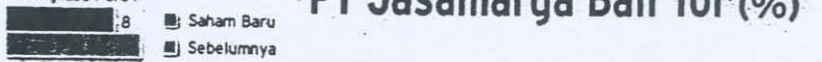
PT Jasa Marga Tbk



PT Pelindo III



PT Angkasa Pura I



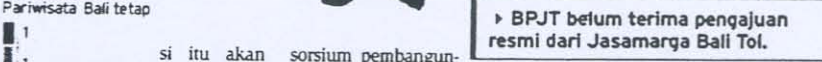
PT Utama Karya



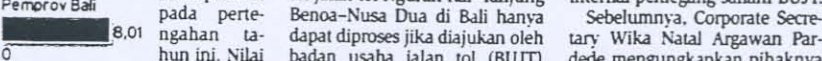
PT Adhi Karya Tbk



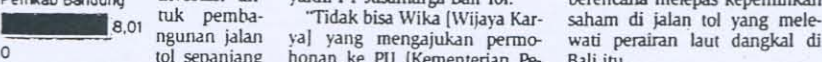
PT Pengembangan Pariwisata Bali tetap



Pemorov Bali



Pemkab Bandung



Sumber: Jasamarga Bali Tol
BISNIS/HUSN PARAPAT

DIAJUKAN BUJT

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan rencana PT Wijaya Karya Tbk untuk melepas sahamnya dalam kon-

Pemilik Baru Saham PT Jasamarga Bali Tol (%)



► Pemprov Bali dan Pemkab Badung masing-masing kuasai 8,01%.

► Proyek beroperasi pertengahan tahun ini.

► BPJT belum terima pengajuan resmi dari Jasamarga Bali Tol.

si itu akan beroperasi pada pertengahan tahun ini. Nilai investasi untuk pembangunan jalan tol sepanjang 9,7 kilometer itu mencapai Rp2,48 tri-

sorsium pembangunan jalan tol Ngurah Rai-Tanjung Benoa-Nusa Dua di Bali hanya dapat diproses jika diajukan oleh badan usaha jalan tol (BUJT) yakni PT Jasamarga Bali Tol.

"Tidak bisa Wika [Wijaya Karya] yang mengajukan permohonan ke PU [Kementerian Pekerjaan Umum] untuk perubahan saham, harus badan usaha," ujar Kepala BPJT Achmad Gani Ghazaly Akman kepada *Bisnis*, Senin (4/2).

Namun, pihaknya belum menerima dokumen pengajuan secara resmi dari PT Jasamarga Bali Tol. Perubahan komposisi saham itu bergantung pada rapat

internal pemegang saham BUJT. Sebelumnya, Corporate Secretary Wika Natal Argawan Paradede mengungkapkan pihaknya berencana melepas kepemilikan saham di jalan tol yang melewati perairan laut dangkal di Bali itu.

Penjualan saham di jalan tol Ngurah Rai-Tanjung Benoa-Nusa Dua dilakukan untuk penambahan modal perseroan guna melakukan aksi korporasi lainnya ke depan.

"Lagi berproses, masih menunggu persetujuan dari Kementerian PU," papar Natal. (zutriza)